



**ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas sosial sains

Oleh :

**SRI AGUSTINA
NPM 1615100069**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SRI AGUSTINA
NPM : 1615100069
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S-1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK
MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA
BINJAI

MEDAN, JUNI
2021

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. Rahima Purba, S.E, M.Si., Ak., CA)



(Dr. Ony Medaline, S.H., M.Kn)

PEMBIMBING I

(Dr. Rahima Purba, S.E, M.Si., Ak., CA)

PEMBIMBING II

(Suwano, S.E)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN PANCABUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : SRI AGUSTINA
NPM : 1615100069
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S-1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK
MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI

MEDAN, APRIL 2021

KETUA

(Hernawaty, SE, MM)

ANGGOTA II

(Suwarno, SE, MM)

ANGGOTA I

(Dr. Rahima Purba, S.E, M.Si, Ak., CA)

ANGGOTA III

(Irawan, SE, M.Si)

ANGGOTA IV

(Dito Aditia Darma Nst, SE, M.Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SRI AGUSTINA
NPM : 1615100069
Fakultas/Program Studi : AKUNTANSI
JudulSkripsi : ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK
MENILAI EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, April 2021


METERAI
TEMPEL
SRI AGUSTINA
1615100069

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini .

Nama : SRI AGUSTINA
Tempat/ Tanggal Lahir : P. Siantar, 22 Agustus 1997
NPM : 1615100069
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : JL. A yani Kw. Begumit

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi.

Sehubung dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai di masa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat di penggunaan seperlunya.

Medan, 30 November 2021
Yang Membuat Pernyataan



SRI AGUSTINA

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : SRIAGUSTINA
NPM : 1615100069
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

menyatakan **benar** bahwa judul skripsi saya mengalami perubahan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing saya. Judul skripsi saya pertama yang telah disetujui adalah :
" ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA KANTOR CAMAT BINJAI KABUPATEN LANGKAT "

dan judul skripsi saat ini setelah diubah adalah :

" ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI "

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 08 November 2021

Dibuat oleh,



SRI AGUSTINA

NPM. 1615100069

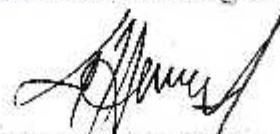
Diketahui oleh,

Dosen Pembimbing I



Dr. Rahma Purba, S.E., M.Si., AK.CA

Dosen Pembimbing II



(Suwarto, SE., MM)

Ace Siday
23/4 - 2021



**ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI
EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

SRI AGUSTINA
NPM 1615100069

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



Acc *DP H. Salsang*
Salsang 7/6 2021
Suisarno

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI
EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

SRI AGUSTINA
NPM 1615100069

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

Ace jilid lux

10/11-2021



Ace jilid lux

Agustina
11/11/2021
SP Y

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas sosial sains

Oleh :

SRI AGUSTINA
NPM 1615100069

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend.Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.
Email : admba_fe@unpab.pancabudi.org <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

UNIV / PTS : Pembanguna Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing : Suwarno,SE
Nama Mahasiswa : Sri Agustina
Jurusan / Program Studi : Akuntansi
No. Stambuk / NPM : 1615100069
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Skripsi : ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAL

tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
6-21	Perbaiki kata Pengantar - Perbaiki tabel di bab IV - Perbaiki hal 40	<i>[Signature]</i>	
6-21	Ace Sidang meja hijau <i>[Signature]</i> / 7/6 202	<i>[Signature]</i>	

Medan,
Diketahui / Disetujui Oleh :
Ka. Prodi

[Signature]
Rahima bti. Purba, SE.,MSi,AK,CA

Dosen Pembimbing

[Signature]
Suwarno,SE



**SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 321/PERP/BP/2021**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: Sri Agustina
: 1615100069
Semester : Akhir
: SOSIAL SAINS
Prodi : Akuntansi

nya terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 07 Agustus 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST, M.Kom

Dokumen : FM-PERPUS-06-01
: 01
Efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 14 Agustus 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Agustina
 Tempat/Tgl. Lahir : Pematang Siantar 7 22-08-1997
 Nama Orang Tua : AZHARI
 N. R. N : 1615100069
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 081341613020
 Alamat : JL. A YANI LK III KM. BEGAWIT

Dengan bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan Judul Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kota Binali. Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan RKM yang telah dibagikan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan memotot ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan tidak prestasi (IP), dan mohon dibertukarkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tetap keterangan bebas pustaka.
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk Ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 3 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB-SLTA difotokopi 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutin DS ke SL terlampir ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwitansi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 contoh (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 contoh untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan disesuaikan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangan dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan Ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di resakan kedatan MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1.000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1.750,000
Total Biaya	: Rp.	2.750,000

Ukuran Toga :

S

Ditetahui/Dibantu oleh :



Dr. Orny Mediane, S.H., M.H.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



Hormat saya



Sri Agustina
 1615100069

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Buku Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Buku Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), orkib - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka LPMU UNPAD menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/ pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAD.



Kitonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Plagiarism Detector v. 1857 - Originality Report 8/7/2024 10:54:52 AM

Author(s): **AGUSTINA SRI AGUSTINA** | **AKUNTANSI.doc** | License: **Universitas Pembangunan Panca Budi_Licensed02**

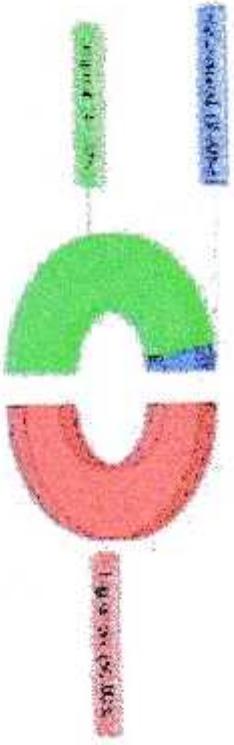
[Copy/Export as Plain Text](#) [Raw Data](#) [Download Report \(PDF\)](#)

[Copy to Clipboard](#) [Internet Check](#)



Question document word similarity:

[View Similarity](#)





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Sri Agustina
 Tempat/Tgl. Lahir : Pematang Siantar / 22 Agustus 1997
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100069
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 138 SKS, IPK 3.49
 Nomor Hp : 082272051490
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Analisis realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah pada kantor camat birjai kabupaten langkat.0

Uraian : Disisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan-Terjadi

*Coret Yang Tidak Perlu



Medan, 07 Januari 2020

Pemohon,

(Sri Agustina)



Tanggal : 07 - Januari - 2020

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing I :

(Rahma br. Purba, SE., M.St., Ak., CA.)



Tanggal : 07 - Januari - 2020

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II :

(Suwarno, SE., MM)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana realisasi anggaran Pemerintah daerah Kota Binjai pada periode 2016-2019. Dalam penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu metode dokumentasi dan studi pustaka. Data yang digunakan ialah data sekunder yang diperoleh dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Jdih) Kota Binjai yang berupa Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016- 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas realisasi anggaran kinerja pemerintah daerah kota binjai tahun anggaran 2016-2019 dapat dikatakan cukup efektif yairu memiliki tingkat presentase efektivitas rata-rata kurang dari 100%, dan dalam tingkat efisiensi realisasi anggaran kinerja pemerintah daerah kota binjai pada tahun 2016 memiliki kriteria kurang efisien, kemudian di tahun 2017 memiliki kreteria cukup efisien dan tahun 2018-2019 memiliki kriteria kurang efisien, dengan memiliki tingkat presentase efisiensi rata-rata 80%-89,99%. Dengan hal ini pemerintah daerah kota binjai cukup berhasil menunjukkan kinerja yang cukup baik dan pemerintah kota binjai dinilai belum bisa menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja.

Kata Kunci : Realisasi Anggaran, Efektivitas Anggaran, Efisiensi Anggaran

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the extent of the realization of the local government budget of the city of Binjai in the 2016-2019 period. In this study using a quantitative descriptive method, with data collection techniques, namely the method of documentation and literature study. The data used is secondary data obtained from the National Legal Documentation and Information Network (Jdih) of the city of binjai in the from of the 2016-2019 Regional Revenue and Expenditure Budget Financial Report. The results show that the level of effectiveness of then realization of the performance budget of the local government of the city of Binjai for the 2016-2019 fiscal year can be said to be quite effective, that is, it has an average percentage level of effectiveness of less than 100%, and the efficiency level of realization of the performance of the local government of the city of binaji in 2016 has the criteria are less efficient, in the 2017 the criteria are quite efficient and in 2018-2019 the criteria are less efficient, by having an average efficiency percentage level of 80%-89,99%. With this, the local government of the city of Binjai is quite successful in showing a fairly good performance vand the government of the city of Binjai is considered unable to save funds in budget management.

Keywords: Budget Realization, Budget Effectiveness, Budget Efficiency

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Kota Binjai”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih jauh dari dalam kata kesempurnaan, mengenai isi maupun dan pemakaian bahasa. Sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E, MM, selaku Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
2. Teristimewa penulis mempersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Azhari dan ibunda Risnawati. Terima kasih telah merawat, membimbing dan memberikan dukungan moril dan material serta memberikan doa kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini dengan baik.
3. Ibu Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar,SE.,M.Si selaku ketua program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
5. Ibu Dr. Rahima Purba, S.E, M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing satu yang sudah banyak membantu dan memberikan pengarahan kepada peneliti dalam proses penyelesaian skripsi.

6. Bapak Suwarno, SE Selaku Dosen Pembimbing dua yang juga banyak membantu peneliti melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi yang selama ini telah mendidik peneliti.
8. Teruntuk teman-teman akuntansi kelas siang A terutama milda hafisyahrani, Terima kasih banyak selama ini telah membantu dan memberi motivasi bagi penulis dan menjadi teman yang baik.
9. Semua pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi. Tak lupa peneliti meminta maaf kepada semua pihak apabila terjadi sesuatu hal yang tidak berkenan di hati dan kesalahan penulisan skripsi ini, peneliti juga berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 20 Maret 2021
Peneliti

SRI AGUSTINA
1615100069

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	5
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2. Batasan Masalah	5
1.3. Perumusan Masalah	5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Landasan Teori.....	9
2.1.1. Teori Efektivitas	9
2.1.2. Teori Efisiensi	10
2.1.3. Teori Pengendalian Realisasi Program	11
2.1.4. Pengertian Anggaran Sektor Publik.....	12
2.1.5. Fungsi Anggaran Sektor Publik.....	14
2.1.6. Prinsip Anggaran Sektor Publik	17
2.1.7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	18
2.1.8. Fungsi dan Tujuan APBD	20
2.1.9. Pendapatan Asli Daerah	21
2.1.10. Laporan Realisasi Anggaran Publik	26
2.1.11. Komponen Laporan Realisasi Anggaran Publik	28
2.1.12. Efektivitas Kinerja Anggaran Sektor Publik.....	32
2.1.13. Efisiensi Kinerja Anggaran Sektor Publik	33
2.2. Penelitian Terdahulu	33
2.3. Kerangka Konseptual	34
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian.....	37
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.2.1. Lokasi Penelitian	37
3.2.2. Waktu Penelitian	37
3.3. Jenis dan Sumber Data	38
3.3.1. Jenis Data	38

3.3.2. Sumber Data.....	38
3.4. Definisi Operasional.....	38
3.5. Teknik Pengumpulan Data	40
3.6. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	44
4.1.1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai	44
4.1.2. Visi dan Misi Pemerintah Kota Binjai.....	45
4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Binjai.....	47
4.1.4. Deskripsi Uraian Pekerjaan.....	49
4.1.5. Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan.....	52
4.1.6. Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja	54
4.1.7. Analisis Efektivitas Anggaran.....	56
4.1.8. Analisis Efisiensi Anggaran	58
4.2 Pembahasan	60
4.2.1. Efektifitas Anggaran Pendapatan	60
4.2.2. Efisiensi Anggaran Belanja	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	65
5.2. Saran.....	65
Dafta Pustaka.....	67
Lampiran	69

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Anggaran dan Realisasi APBD Kota Binjai 2016–2019.....	4
Tabel 2.1. Penelitian Sebelumnya.....	33
Tabel 3.1. Skedul Proses Penelitian.....	37
Tabel 3.2. Defenisi Operasional Variabel Penelitian.....	39
Tabel 4.1. Perhitungan Efektivitas Anggaran	56
Tabel 4.2. Perhitungan Efesiensi Anggaran.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemeintah Kabupaten/Kota.....	
31	
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Binjai.....	48
Gambar 4.2. Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan.....	53
Gambar 4.3. Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja.....	54
Gambar 4.4. Grafik Capaian Efektivitas.....	57
Gambar 4.4. Grafik Capaian Efisiensi Anggaran.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran daerah salah satu indikator penilaian efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah yang sangat penting untuk di analisis. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai suatu kegiatan organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan bisa juga dibilang dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam bentuk barang. Anggaran publik berkaitan dengan proses penentuan jumlah alokasi dan untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat.

Pemberlakuan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih dikenal dengan sebutan otonomi daerah yang diubah UU No 23 tahun 2014 yaitu tentang Pemerintahan Daerah, lalu disempurnakan dengan UU No. 9 tahun 2015 yaitu tentang Pemerintahan Daerah dan untuk perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, mengeluarkan juga UU No. 33 tahun 2004 adalah tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah dengan ini menyatakan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dokumentasi, tugas pembantuan, dan intansi vertical juga perlu di atur dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sistem keuangan ini diatur berdasarkan pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan. Kedua UU ini sangat erat kaitannya dengan adanya peralihan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah yang harus diikuti dengan

penyerahan keuangan yang sangat dipercaya pemerintah pusat untuk bisa diolah keuangan di masing-masing daerah.

Perwujudan *Good Government* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma tersebut, pemerintah otonomi kepada daerah seluasluasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar semangkin berguna dan berhasil menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka melayani masyarakat. Tuntunan ini agar organisasi sektor publik harus lebih memperhatikan *value for money* (ekonomis, efisiensi, dan serta efektivitas) dalam menjalankan setiap setiap aktivitasnya. Menurut Sumenge (2013) menyatakan bahwa “Tujuan yang dikehendaki masyarakat yang bertanggung jawab mengenai *value for money*, adalah ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam setiap penggunaan sumber alam yang artinya pengguna diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam yang diartikan mencapai tujuan dan sasaran”.

Anggaran publik adalah alat perencanaan dan sekaligus alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan diindikasikan dengan target yang harus dicapai oleh publik, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian yang diindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui oleh legislative untuk di

belanjaan, melalui data rekening belanja yang dapat dalam anggaran belanja lembaga atau organisasi pemerintah akan dilihat apakah anggaran tersebut telah dibuat dan dapat berperan sebagai pengendalian terhadap suatu pelaksanaan kegiatan publik. Laporan realisasi anggaran adalah jenis laporan keuangan daerah yang lebih dihasilkan dahulu kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas.

Anggaran dalam sektor publik yaitu sebagai tulang punggung (*back-bone*) penyelenggaraan pemerintahan. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan keuangan suatu perusahaan adalah bentuk informasi yang dapat disampaikan secara relevan apabila yang digunakan sistem yang tepat, hal tersebut sangat bermanfaat bagi perusahaan, terutama bagi para pengambil keputusan harus dapat menentukan segala sesuatunya dengan baik dan efektif bagi kelangsungan hidup perusahaan.

Efisiensi dan Efektivitas sangatlah penting untuk pengukuran atau membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan serta terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya. Menurut Mahmudi (2011) mengatakan bahwa “Efisiensi terkait dengan hubungan antara *output* berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut”. Sedangkan, efektivitas (hasil guna) ialah dukungan pengeluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai, yang pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan dan paket kebijakan.

Penilaian efektivitas dan efisiensi pada Dinas Perhubungan Kota Medan lebih ditekankan dengan penilaian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilakukan pada setiap tahun anggaran. Penilaian kinerja yang melalui LAKIP bertumpu pada *output* yang diperoleh oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dengan membandingkan setiap rencana yang ingin dicapai tanpa memperhatikan *outcome*, Oleh karena itu LAKIP ialah sarana yang sangat penting bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaian yang dilakukan instansi publik tersebut.

Berikut ini perkembangan anggaran dan realisasi dari APBD kota Binjai selama periode 2016–2019.

**Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi
APBD Kota Binjai 2016–2019**

Jenis Anggaran		2016	2017	2018	2019
1	Pendapatan				
	Anggaran	985,607,494,365.00	964,903,163,076.00	870,461,218,147.00	948,180,431,992.00
	Realisasi	983,874,628,421.00	879,551,758,424.48	867,761,218,147.00	960,365,036,459.00
	Persentase	99.824%	91.154%	99.690%	101.285%
2	Belanja				
	Anggaran	1,023,554,570,568.90	978,587,608,010.32	951,373,613,233.00	961,857,047,999.00
	Realisasi	1,025,411,103,368.50	849,025,483,683.96	867,761,218,147.00	957,665,036,459.00
	Persentase	100.181%	86.760%	91.211%	99.564%
3	Pembiayaan				
	Anggaran	37,947,076,203.90	14,273,184,659.32	13,766,616,007.00	13,766,616,007.00
	Realisasi	38,233,614,169.60	15,687,285,030.15	8,072,342,059.00	3,200,000,000.00
	Persentase	100.755%	109.907%	58.637%	23.245%

Sumber : Pemko Binjai, 2020

Data di atas menunjukkan selama periode 2016 sampai 2019 pendapatan asli daerah pemerintah kota Binjai mengalami fluktuasi, sedangkan belanja daerah mengalami penurunan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Binjai belum mampu menetapkan anggaran yang sesuai, sehingga banyak hal-hal yang diperbaiki serta ditindak lanjuti untuk sebagai program kerja yang lebih baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Binjai belum terlihat efektif serta efisien dalam merealisasikan anggarannya. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil judul tentang **"Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kota Binjai"**.

1.2. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

- a. Peningkatan penerimaan daerah belum sesuai target yang diharapkan.
- b. Terjadi peningkatan belanja daerah mengindikasikan adanya dampak pada efisiensi penggunaan anggaran.

1.2.2. Batasan Masalah

Agar permasalahan tidak terlalu luas serta untuk mempermudah dan memperjelas pelaksanaan penelitian, maka permasalahan dibatasi tentang efektifitas dan efisien APBD daerah kota Binjai periode 2016 - 2019.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang yang telah dikembangkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang menjadi dasar dalam penyusunan Skripsi ini, yaitu :

- a. Bagaimana realisasi anggaran Pemerintahan Kota Binjai periode 2016 sampai dengan 2019 ?
- b. Bagaimana tingkat efektivitas realisasi anggaran Pemerintahan Kota Binjai periode 2016 sampai dengan 2019 ?
- c. Bagaimana tingkat efisiensi realisasi anggaran Pemerintahan Kota Binjai periode 2016 sampai dengan 2019 ?
- d. Apakah realisasi anggaran Pemerintahan Kota Binjai sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana realisasi anggaran Pemerintah Kota Binjai periode 2016 sampai dengan 2019.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tingkat efektivitas realisasi anggaran Pemerintah Kota Binjai periode 2016 sampai dengan 2019.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tingkat efisiensi realisasi anggaran Pemerintahan Kota Binjai periode 2016 sampai dengan 2019.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Realisasi Anggaran Pemerintahan Kota Binjai sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisiensi.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka penelitian ini mempunyai empat manfaat, yaitu :

- a. Bagi Pemerintah Kota Binjai

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Binjai dalam mengevaluasi Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah.

b. Bagi Pihak Akademis

Penelitian ini menjadi masukan dalam sebagai sumbangan pemikiran bagi Universitas selaku lembaga pendidikan dalam mengembangkan ilmu Akuntansi Publik terutama berkaitan dengan Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan untuk dipelajari dan dikaji lebih mendalam lagi mengenai Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah.

d. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian lain yang berhubungan dengan Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Kiky Muryanti (2017) yang meneliti tentang Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015 . Perbedaan penelitian terletak pada :

a. Variabel penelitian : penelitian tidak memiliki perbedaan variabel dengan penelitian sebelumnya.

- b. Jumlah observasi/ sampel (n) :** peneliti terdahulu menggunakan data tahun 2011-2015 sedangkan penelitian sekarang menggunakan data tahun 2016-2019.
- c. Waktu penelitian :** penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2017 sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2020.
- d. Lokasi penelitian :** penelitian terdahulu dilakukan pada Pemerintah Daerah Wonogiri sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kota Binjai.
- e. Metode penelitian :** peneliti sama - sama menggunakan analisis deskriptif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. LANDASAN TEORI

2.1.1. Teori Efektivitas

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti memberikan hasil yang memuaskan. Teori Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah perusahaan ataupun organisasi. Efektivitas tidak sama dengan efisiensi karena keduanya mempunyai makna yang berbeda, walaupun kata efisiensi terkait dengan efektivitas. Efisiensi memiliki pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

Mahmudi (2016) menyatakan “analisis efektivitas merupakan kemampuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan dan membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang di anggarkan”. Rasio efektivitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan PAD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Oleh karena itu nilai efektivitas dikategorikan sebagai berikut:

- a. Sangat efektif : > 100%
- b. Efektif : 100%
- c. Cukup efektif : 90% - 99%
- d. Kurang efektif : 75% - 89%
- e. Tidak efektif : < 75%

2.1.2 Teori Efisiensi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) efisiensi dapat diartikan sebagai ketepatan cara didalam melakukan sesuatu, serta kemampuan melaksanakan tugas dengan baik serta tepat tanpa membuang biaya, waktu, dan juga tenaga. Menurut Mahmudi (2016) mengatakan bahwa “Analisis Efisiensi adalah pendapatan yang dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi penerimaan pendapatan”.

Tujuan dan manfaat efisiensi adalah untuk mencapai hasil dan tujuan yang ingin dicapai, menghemat penggunaan sumber daya sehingga tidak ada yang terbuang dengan sia-sia, meningkatkan kinerja suatu unit kerja sehingga hasil keluaran semakin maksimal, untuk memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan.

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan dan belanja dengan realisasi yang diterima. Oleh karena itu penilaian efisiensi sebagai berikut yaitu :

- a. Tidak efisien : $> 100\%$
- b. Kurang efisien : $100\% - 90\%$
- c. Cukup efisien : $90\% - 80\%$
- d. Efisien : $80\% - 60\%$
- e. Sangat efisien : $< 60\%$

2.1.3. Teori Pengendalian Realisasi Program

Pengendalian adalah proses usaha untuk membandingkan prestasi kerja dengan rencana, serta untuk mengoreksi penyimpangan atau kesenjangan yang terjadi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengendalian realisasi program merupakan proses usaha untuk membandingkan prestasi kerja program dengan rencana program. Pengendalian realisasi program dilakukan untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi agar program dapat berjalan sesuai yang seharusnya dan tujuan organisasi secara keseluruhan dapat terjadi.

Pengendalian program dilakukan untuk menjamin aktivitas yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan organisasi. Pengendalian adalah suatu ukuran pelaksanaan dengan membandingkan hasil sesungguhnya yang dicapai oleh program dengan tolak ukur atau standar yang telah ditetapkan. Dengan pengendalian organisasi akan mengawasi dan mengevaluasi apakah program berjalan seperti yang diinginkan, sehingga apabila organisasi tidak melakukan pengendalian dengan baik mungkin saja organisasi akan gagal mencapai tujuannya. Fungsi pengendalian yaitu :

- a. Pengendalian preventif (berbentuk sistem kendali mutu proses), berfungsi untuk memastikan sasaran program dan rencana strategis lain tercapai.
- b. Pengendalian operasional (berbentuk pengawasan realisasi anggaran), berfungsi agar anggaran dapat efektif dan efisien,
- c. Pengendalian kinerja (pengukuran hasil dibandingkan tolak ukur kinerja), yang fungsinya untuk menjamin kualitas rencana.

2.1.4. Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran Sektor Publik yaitu rencana financial yang berisi tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dimasa sebelumnya sebagai acuan penepatan anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran adalah salah suatu proses politik, Karena di dalam sektor publik anggaran yang harus diinformasikan kepada publik untuk di kritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Penggunaan anggaran pada sektor publik sebagai alat penuntun bagi perencanaan dan pengendalian sumber daya baik itu keuangan atau sebaliknya.

Sektor publik mempunyai peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa. Kegagalan pada sektor publik dapat berdampak pada terganggunya sektor bisnis dan sosial yang dapat memicu kondisi krisis suatu bangsa. Oleh karena itu, pembangunan sektor publik harus dilakukan secara terusmenerus dan tidak boleh diabaikan.

Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa pengertian anggaran sektor publik adalah “ Anggaran sektor publik ialah instrument akuntabilitas atas pengelolaan dan publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik”. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik yaitu suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan belanja, dan aktifitas. Penganggaran sektor publik sangat terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter. Pada sektor publik, anggaran harus

diinformasikan dengan jelas kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.

Anggaran merupakan salah satu alat bantu manajemen yang memegang peranan sangat penting karena dengan anggaran manajemen dapat merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi jalannya yang sesuai dengan kegiatannya. Nafarin (2012) menyatakan bahwa “Anggaran yaitu sesuatu rencana tertulis kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dalam jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang”. Menurut “*Commite on Governmental Accounting*” Haruman (2010) mengatakan bahwa “anggaran merupakan suatu rencana operasi keuangan yang mencakup semua estimasi pengeluaran yang telah diusulkan dan dari sumber pendapatan yang didapatkan untuk pembiayaan dalam periode waktu tertentu”.

Bastian (2010) mengatakan bahwa Anggaran memiliki suatu karakteristik yaitu sebagai berikut :

- a. Anggaran dijelaskan dalam bentuk satuan keuangan dan satuan non keuangan.
- b. Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu dan dalam satuan tahun.
- c. Anggaran berisi tentang komitmen dan kesanggupan manajemen yang tujuannya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Usulan anggaran yang disetujui oleh pihak yang berwajib lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
- e. anggaran yang disusun hanya bisa diubah dengan kondisi tertentu.

2.1.5 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut :

a. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan atau *Planning Tool*).

Anggaran sektor publik yang dibuat untuk merencanakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu, berupa berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang telah diperoleh dari belanja pemerintah. Adapun Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk sebagai berikut :

- 1) Untuk merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- 2) Untuk merencanakan suatu program dan kegiatan yang untuk pencapaian tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.
- 3) Untuk pengalokasian dana di berbagai program dan kegiatan yang disusun.
- 4) Untuk menentukan indikator kinerja yang telah ditentukan dan tingkat pencapaian strategi.

b. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian atau *Control Tool*.

Anggaran sebagai alat pengendalian yaitu sebagai alat pengendalian yang memberikan rencana sangat detail atas pendapatan serta pengeluaran pemerintah agar yang dibelanja bisa dipertanggung jawabkan kepada publik. Anggaran sebagai alat pengendalian dapat juga digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran dalam bentuk lain yang bukan merupakan prioritas. Adapun alat

Pengendalian anggaran publik yang bisa dilakukan dengan empat cara, yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk Membandingkan kinerja yang aktual dengan kinerja yang dianggarkan.
- 2) Untuk Menghitung selisih anggaran (*favourable* dan *unfavourable variances*).
- 3) Untuk Menentukan apa yang menjadi penyebab yang dapat dikendalikan (*controllable*) danb tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) dala suatu varians.
- 4) Untuk revisi standar biaya dan target anggaran untuk tahun yang akan datang.

c. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal atau *Fiscal Tool*.

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal ini pemerintah juga dapat digunakan untuk menstabilkan ekonomi serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran bisa juga digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

d. Anggaran Sebagai Alat Politik atau *Political Tool*.

Anggaran dapat digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap suatu prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran ialah dokumen politik dalam bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik yang untuk kepentingan tertentu. Dalam pembentukan anggaran ini publik dapat membutuhkan

political skill, coalition building, keahlian bernegosiasi serta pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik pada para manajer publik.

- e. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi atau *Coordination and Communication Tool*.

Dalam unit kerja pemerintahan yang dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran, Anggaran publik adalah alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang telah disusun dengan baik akan bisa mendeteksi apa yang telah terjadi disuatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi sangat baik.

- f. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja atau *Performance Measurement Tool*.

Anggaran adalah wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif dapat dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan. Kinerja manajer publik dapat dinilai berdasarkan berapa yang berhasil di capai, dikaitkan dengan anggaran yang sudah ditetapkan.

- g. Anggaran Sebagai Alat Motivasi atau *Motivation Tool*.

Anggaran ini merupakan alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja lebih secara ekonomis, efektif dan efisien dalam pencapaian target yang ditentukan. Untuk memotivasi pegawai, anggaran seharusnya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable* maksudnya yaitu target anggaran jangan terlalu lebih sehingga tidak dapat dipenuhi dan jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk didapatkan.

- h. Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik atau *Public Share*.

Berfungsi untuk organisasi swasta yaitu dokumen rahasia yang sangat tertutup untuk publik. Masyarakat dan elemen masyarakat lainnya non publik, seperti LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, dan organisasi masyarakat lainnya, yang dapat terlibat dalam proses penganggaran publik. Keterlibatan ini dapat bersifat langsung ataupun tidak langsung. Keterlibatan yang bersifat langsung yaitu masyarakat dalam proses penganggaran dapat dilaksanakan mulai dari proses penyusunan perencanaan pembangunan ataupun rencana kinerja publik (daerah), sedangkan keterlibatan yang bersifat tidak langsung ialah yang mewakili mereka di lembaga legislatif (DPR/DPRD).

2.1.6 Prinsi Anggaran Sektor Publik

Adapun beberapa anggaran sektor publik yang memiliki prinsip, yaitu sebagai berikut :

- a. Otoritas legislatif yaitu Anggaran publik yang mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dan dapat membelanjakan anggaran tersebut.
- b. Komprehensif adalah semua anggaran harus menunjukkan penerimaan serta pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, adanya dana non *budgetair* yang pada dasarnya menyalahkan prinsip-prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.

- c. Keutuhan anggaran ialah Semua penerimaan atau belanja pemerintah harus tertulis dalam dana umum.
- d. *Nondiscretionary Appropriation* adalah Jumlah yang telah disetujui oleh dewan legislative dapat bermanfaat secara ekonomis, efisien, dan efektif.
- e. Periodik merupakan suatu proses anggaran yang bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan.
- f. Akurat adalah estimasi anggaran yang semestinya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, dapat dijadikan sebagai pemborosan dan *inefisiensi* anggaran dan dapat menyebabkan munculnya *underestimate* pendapatan over pengeluaran.
- g. Jelas ialah Anggaran seharusnya sederhana, dapat difahami dan tidak membingungkan masyarakat.
- h. Diketahui publik maksudnya aialah anggaran ini sangat penting diinformasikan ke masyarakat luas agar mengetahui anggaran tersebut.

2.1.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu rencana penerimaan dan pengeluaran daerah yang mencakup rencana pendapatan, belanja, bagi hasil, cadangan, dan pembiayaan yang disetujui oleh DPRD dan ditentukan dalam Peraturan Daerah (PERDA). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat disingkat APBD merupakan suatu kegiatan keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara).

Menurut Mahsun (2011) menyatakan bahwa “Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan daftar yang memuat penjabaran penerimaan daerah serta pengeluaran belanja daerah selama satu tahun”.

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa “APBD adalah rencana kegiatan kerja pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan melibatkan adanya suatu sumber penerimaan yang mengenai target dan beban dalam batas maksimal untuk suatu periode anggaran”.

Semua bentuk Penerimaan Daerah serta Pengeluaran Daerah harus ditulis dan dikelola dalam APBD. APBD adalah dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD yaitu rencana kegiatan yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam bentuk pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan penerimaan Daerah bertujuan sebagai memenuhi target yang telah ditetapkan dalam APBD. APBD ialah dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi salah satu dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan serta pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBD dan tahun anggaran APBN yaitu sama mulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah bisa dilaksanakan dalam waktu tersebut.

Berkaitan dalam belanja yaitu jumlah belanja yang telah dianggarkan ialah batas tertinggi pada setiap jenis belanja. Oleh karena itu, realisasi belanja tidak dapat melebihi jumlah anggaran belanja yang sudah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung pada adanya kepastian yang tersedia di penerimaan dalam jumlah yang cukup.

APBD yang meleputi dari anggaran pendapatan dan pembiayaan, pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Sedangkan bagian dana perimbangan iyalah: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus, kemudian pendapatan yang sah seperti dana hibah serta dana darurat. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang harus dibayar kembali atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.1.8. Fungsi dan Tujuan APBD

Adapun beberapa fungsi APBD jika dilihat dari kebijakan fiskal yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi otorisasi merupakan anggaran daerah yang menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan yaitu bahwa anggaran daerah menjadi patokkan untuk manajemen dalam merencanakan kegiatannya pada tahun yang berkaitan.
- c. Fungsi pengawasan memiliki arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk penilaian apakah kegiatan ini diselenggarakan pemerintah daerah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi mempunyai arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan agar terciptanya lapangan pekerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

- e. Fungsi distribusi adalah setiap kebijakan anggaran daerah harus memperlihatkan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi yaitu bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi petunjuk untuk memelihara dan mengutamakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah yang baik.

Setiap tahunnya pemerintah daerah harus menyusun dan membuat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari penyusunan APBD ialah sebagai petunjuk pengeluaran dan penerimaan daerah agar menjadi keseimbangan yang dinamis, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan daerah demi menciptakan peningkatan produksi, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Akhirnya semua ditujukan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, baik itu material ataupun spiritual yang berdasarkan peraturan Pancasila dan UUD 1945, serta mengatur pembelanjaan daerah dan penerimaan daerah untuk mencapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata.

2.1.9. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah atau PAD yaitu salah satu komponen sumber pendapatan daerah yang diatur dalam pasal 79 UU No 22 tahun 1999 ialah tentang pemerintahan daerah, berdasarkan pada pasal 79 UU No 22 tahun 1999 dapat diartikan sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang didapat dari sumber - sumber di wilayahnya berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Bahihaqi (2011) menyatakan bahwa “Pendapatan daerah merupakan penambahan nilai pendapatan yang berasal dari berbagai sektor pendapatan daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai peningkatan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang berkaitan”. UU No. 28 Tahun 2009 dengan ini menyatakan bahwa “pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan daerah yang didapat dari wilayah daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

UU No.32 Tahun 2004 menyebutkan “Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai nilai penambah kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu”. Dalam UU No.33 Tahun 2004 mengatakan bahwa “Pendapatan asli daerah yang disebut PAD yaitu pendapatan yang didapati dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan”.

Mengenai beberapa pendapat-pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah ialah semua penerimaan keuangan yang telah didapat suatu daerah dimana penerimaan tersebut di dapatkan dari sumber-sumber yang memiliki potensi di daerah tersebut contohnya yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan UU RI No.32 Tahun 2004 sumber-sumber pendapatan asli daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari:
 - a. Hasil Pajak Daerah yaitu, berdasarkan pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009 ialah berkontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak ini digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dari itu pajak daerah merupakan pemungutan pajak yang dilakukan daerah yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk mengelola dan membangun rumah tangganya. Adapun beberapa jenis hasil pajak daerah sebagai berikut : pajak hotel, pajak restaurant dan rumah makan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bahan galian golongan c, dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan pemukiman.
 - b. Hasil retribusi daerah yaitu sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009). Adapun beberapa jenis dalam retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil pendapatan daerah yang didapatkan dari keuntungan perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan merupakan juga bagian anggaran untuk

belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain yaitu : bagian laba, deviden, serta penjualan saham milik daerah.

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah berupa jasa giro, penjualan aset tetap daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, serta bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa daerah.

2. Dana perimbangan berdasarkan Undang - Undang No.33 Tahun 2004 yaitu tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa “Dana Perimbangan merupakan dana yang didapat dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi”. Tujuan dana perimbangan ialah untuk mengurangi kesenjangan pada fiskal yang terjadi antara pemerintah dan pemerintah daerah. Undang - Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 159 sampai Pasal 162 menyatakan dana perimbangan yang terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil, yang bersumber dari hasil pajak serta dari sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak adalah sebagai berikut : 1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, dan kehutanan. 2. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor

perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Adapun dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam ialah sebagai berikut : 1. Penerimaan kehutanan berasal dari iuran hak perusahaan hutan / IHPH, dan provisi sumber daya hutan / PSDH. 2. Penerimaan pertambangan umum yang terdiri dari penerimaan iuran tetap / *landrent* dan penerimaan iuran eksplorasi royalty yang dihasilkan dari wilayah daerah yang berkaitan. 3. Penerimaan perikanan diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan atau penerimaan pungutan hasil perikanan. 4. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan di wilayah daerah tersebut.

- b. Dana Alokasi Umum atau DAU merupakan jumlah dana yang dialokasikan kepada Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya yaitu sebagai dana pembangunan. DAU adalah komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu bagian dari pendapatan pada APBD. Tujuan dari DAU yaitu sebagai pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Dana Alokasi Khusus atau DAK ialah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Undang - Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 164 angka 1 megatakan bahwa pendapatan daerah yang sah ialah seluruh pendapatan daerah yang selain PAD serta dana perimbangan, yaitu meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang telah ditetapkan pemerintah.

2.1.10. Laporan Realisasi Anggaran Publik

Laporan realisasi anggaran atau LRA adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri atas unsur pendapatan dan belanja.

Laporan realisasi anggaran dirinci dalam laporan keuangan akan dijelaskan secara dalam suatu catatan atas laporan keuangan. Penjelasan ini akan memuat informasi yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut.

Dengan ini bahwa laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta beresiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut.

Laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang digunakan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, serta sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Standar laporan realisasi anggaran bertujuan untuk mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan serta menentukan dasar - dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintahan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan.

Laporan realisasi anggaran memiliki informasi yang berguna dalam memprediksikan sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah. Laporan ini juga memprediksi resiko ketidaktepatan dari sumber – sumber daya ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi untuk para pengguna laporan tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan sebagai berikut :

- a. Telah dilakukan secara efektif, efisien, dan hemat.
- b. sudahkah sesuai dengan anggarannya.
- c. Sudahkah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang telah ditentukan.

2.1.11 Komponen Laporan Realisasi Anggaran Publik

Adapun beberapa komponen dari Laporan Realisasi Anggaran yaitu sebagai berikut :

1) Laporan Pendapatan LRA

Pendapatan negara/daerah adalah iuran rakyat yang diamanatkan kepada Pemerintah, sehingga pendapatan LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan

pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum Negara/Daerah. Pembukuan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat notenyanamun ketika biaya atas pendapatan tersebut bersifat variabel dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka dapat mencatat nilai netonya.

2) Laporan Belanja

Belanja merupakan pengurangan ekuitas dana lancar pemerintah untuk pengeluaran yang ditentukan dalam dokumen otoritas kredit anggaran (*allotment*). Belanja dirinci untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan dan dapat diluaskan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

Pembayaran belanja juga dilakukan secara langsung atau melalui dana kas kecil yang diberikan kepada para bendahara pengeluaran. Pembayaran diberikan langsung kepada yang berhak jika jumlah, peruntukan, dan penerimanya sudah pasti. Dana kas kecil digunakan pemerintah untuk membayar keperluan sehari – hari kantor. Pada dasarnya pemerintah menggunakan sistem dana tetap.

3) Laporan Surplus /Defisit - LRA

Surplus – LRA ialah selisih lebih dari pendapatan – LRA dan belanja selama satu periode. Defisit – LRA ialah selisih kurang antara pendapatan – LRA dan belanja selama satu periode pelaporan ini dicatat dalam pos Surplus/Defisit – LRA. Perhitungan surplus/defisit – LRA ini dilakukan di tingkat pemerintah pusat atau daerah melalui jurnal penutup pada saat dilakukan proses konsolidasi.

4) Laporan Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran selanjutnya, yang dalam anggaran publik terutama untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan yaitu semua penerimaan kas daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi publik, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan pihak ketiga, dan penjualan investasi permanen lainnya. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat uang diterima pada rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan dicatat berdasarkan asas bruto. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Daerah.

5) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

Selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran atau SiLPA/SiKPA yaitu selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan atau pengeluaran selama satu

periode pelaporan. SiLPA/SiKPA didapat dari penutupan akun Surplus/Defisit dan pembiayaan neto pada akhir tahun anggaran, untuk selanjutnya dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

**Gambar 2.1 Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemeintah
Kabupaten/Kota**

LAMPIRAN I-A.5
PERATURAN PEMERINTAH RI
NOMOR 8 TAHUN 2006
TANGGAL 3 APRIL 2006

ILUSTRASI FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	20X1			20X0
		Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
53					
54	BELANJA TAK TERDUGA				
55	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)	xxx	xxx	xx	xxx
57	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	xxx	xxx	xx	xxx
58					
59	TRANSFER				
60	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
61	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
62	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xx	xxx
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
64	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)	xxx	xxx	xx	xxx
65	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)	xxx	xxx	xx	xxx
66	SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)	xxx	xxx	xx	xxx
67					
68	PEMBIAYAAN				
69					
70	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
71	Penggunaan SILPA	xxx	xxx	xx	xxx
72	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
73	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
74	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
76	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
78	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
79	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
80	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
83	Jumlah Penerimaan (71 s/d 82)	xxx	xxx	xx	xxx
84					
85	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
86	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
87	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
88	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
91	Jumlah Pengeluaran (86 s/d 90)	xxx	xxx	xx	xxx
92	PEMBIAYAAN NETO (83 - 91)	xxx	xxx	xx	xxx
93					
94	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66-92)	xxx	xxx	xx	xxx

2.1.12 Efektivitas Kinerja Anggaran Sektor Publik

Efektivitas kinerja anggaran sektor publik merupakan suatu ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila organisasi berhasil mencapai tujuan, oleh karena itu organisasi telah berjalan dengan efektif. Efektivitas ini melihat apakah program dan kegiatan telah mencapai kegiatan yang di tentukan. Pengukuran dalam efektivitas mengukur

hasil akhir dari suatu pelayanan setelah itu dikaitkan dengan outputnya (*cost of outcome*).

Mahmudi (2011) menyatakan bahwa” efektivitas atau hasil guna ialah dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus tercapai”. Dalam hal ini efektivitas pada dasarnya sangat berhubungan dengan pencapaian tujuan atau paket kebijakan. Suatu kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatannya mencapai tujuan dan sasaran aktif kebijakan.

Indikator efektivitas ini menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dan keluaran (*output*) program dalam pencapaian tujuan program. Semakin kontribusi output yang dihasilkan berperan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif hasil kerja suatu organisasi. Dalam Pengukuran efektivitas ini dilakukan hanya untuk mengukur *outcome*.

Tingkat suatu efektivitas yang diukur dengan membandingkan realisasi anggaran penerimaan target dengan anggaran penerimaan dengan rumus yaitu sebagai beriku :

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Anggaran penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2011)

2.1.13 Efisiensi Kinerja Anggaran Sektor Publik

Efisiensi kinerja anggaran sektor publik yaitu dapat diukur dengan rasio *output* dan *input*. Pengukuran ini berhubungan erat dengan konsep produktivitas, pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output

yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Efisiensi kinerja anggaran sektor publik lebih bersifat relatif.

Raharjo (2011) mengemukakan bahwa “efisiensi adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan penuh dengan kemampuan yang dimiliki”. Secara sistematis, efisiensi yaitu perbandingan antara *output* dan *input* atau dengan sebutan lain *output* per unit *input*. Oleh karena itu efisiensi merupakan tingkat pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Rasio efisiensi belanja ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Raharjo (2011)

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Sebelumnya

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Abdurrohman Wiro Handoko (2014)	Analisis Realsasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Berbasis Kinerja pada Dispenda Kota Surabaya	Anggaran, Efektivitas, Efisiensi, Kinerja	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dispenda kota Surabaya dalam tingkat efektif dan efisien pada tahun 2011 samapai 2012.
Ariel Sharon Sumenge (2013)	Analisi Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	Anggaran Efektivitas, Efisiensi Kinerja	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran belanja BAPPEDA Minahasa Selatan 2008 samapai 2011 dapat dikatan efektif dan efisien.

	Minahasa Selatan		
Kiky Muryanti (2017)	Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisien Kinerja Pemerintah Daerah Wonogiri Pada Tahun Anggaran 2011 samapai 2015.	Anggaran Efektivitas dan Efisiensi Kinerja	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan sangat efektif dan tingkat efisien pengelolaan keuangan sangat efisien.
Haris Budiman (2018)	Analisis Anggaran dalam Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Banjarmasin	Anggaran Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangannya sudah efektif namun belum efisien dan pengelolaan keuangannya.
Sularsih (2019)	Analisis Implementasi Penilaian Kinerja Anggaran di Tinjau dari Efektivitas dan Efisiensi (Studi Kasus Pemerintah Daerah Magelang)	Anggaran Efektivitas dan Efisiensi Kinerja	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penilaian kinerja anggaran berbasis efektivitas dan efisiensi mampu menilai kinerja pemerintah daerah dengan tepat.

2.3 Kerangka Konseptual

Penyusunan anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja dalam rangka waktu satu tahun, yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif orang lain. Penyusunan anggaran sering diartikan sebagai perencanaan dan pengawasan. Dalam perencanaan anggaran daerah, Pemerintah Daerah menyusun rencana operasional yang implikasinya dinyatakan dalam laporan berupa Laporan Pendapatan LRA, Laporan Belanja, Laporan Surplus /Defisit –

LRA, Laporan Pembiayaan dan Laporan Sisa lebih/kurang pembiayaan (SiLPA/SiKPA).

Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan kinerja Pemerintah Daerah. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Dengan demikian pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu. Aspek pengawasan yaitu dengan membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan, apakah dapat ditemukan efisiensi atau apakah para pelaksana anggaran telah bekerja dengan baik dalam mengelola keuangan daerah. Tujuan pengawasan itu bukanlah mencari kesalahan akan tetapi mencegah dan memperbaiki kesalahan. Sering terjadi fungsi pengawasan itu disalah artikan yaitu mencari kesalahan orang lain atau sebagai alat menjatuhkan hukuman atas suatu kesalahan yang dibuat pada hal tujuan pengawasan itu untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan rencana kerja.

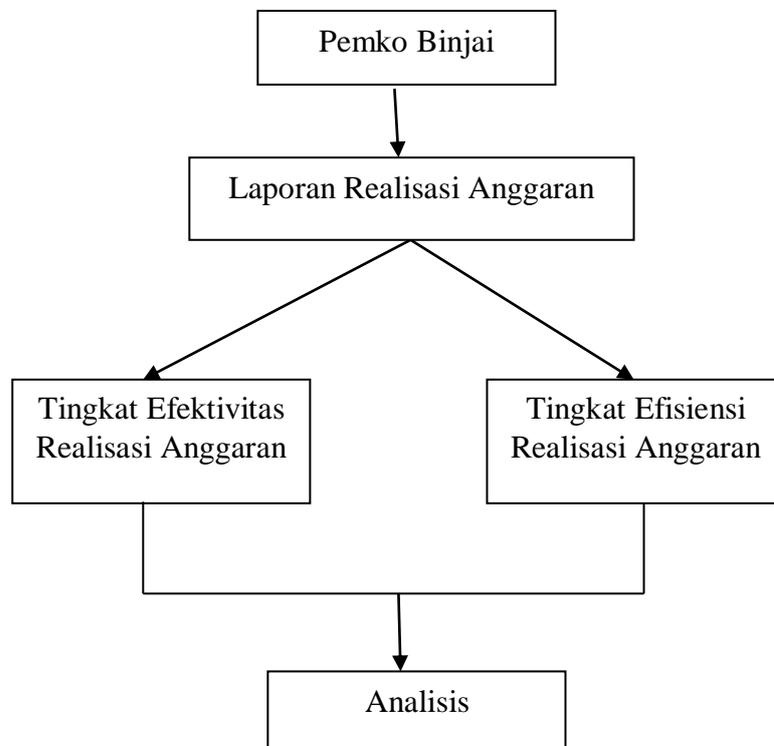
Kinerja anggaran dapat di nilai dari rasio efektivitas dan efisiensi. Efektivitas (hasil guna) adalah dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus tercapai. Menurut Mahmudi (2011) bahwa “Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan dan paket kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan ini mencapai tujuan dan sasaran aktif kebijakan”.

Raharjo (2011) menyatakan bahwa “Efisien ialah suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian dalam pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan

penuh kemampuan yang dimiliki. Secara sistematis, efisiensi adalah perbandingan antara *output* dan *input* atau dengan istilah lain *output per unit input*” .

Berikut ini adalah gambar kerangka konseptual untuk melihat hubungan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif. Umar (2011) mengemukakan bahwa “penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian untuk menyusun, mengklasifikasikan, menafsirkan serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah”.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian adalah Pemerintahan Kota Madyia Binjai sebagai penyelenggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan Februari sampai dengan Juni 2020, dengan format berikut:

Tabel 3.1. Skedul Proses Penelitian

No	Aktivitas	Feb-Mar 20				Apr-Sept 20				Okt-20		Nov- Mar 21				Apr- sep21			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Riset Awal/ Pengajuan Judul	■	■																
2	Penyusunan Prosal			■	■	■	■	■	■										
3	Seminar Proposal									■	■								
4	Perbaikan Acc Proposal										■	■	■	■					
5	Pengolahan Data										■	■	■	■	■				
6	Penyusunan Skripsi											■	■	■	■	■	■	■	■

penelitian nantinya. Untuk mengarahkan penelitian ini penulis mengambil definisi operasional yaitu :

- a. Laporan Realisasi Anggaran Sektor Publik merupakan suatu Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola ,serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam periode pelaporan yang terdiri atas pendapatan dan belanja.
- b. Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Sektor Publik, yaitu Efektivitas kinerja anggaran sektor publik ialah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Pengukuran dalam efektivitas ini mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan outputnya (*cost of outcome*). Sedangkan Efisiensi kinerja anggaran sektor publik adalah lebih bersifat relatif. Pengukuran efisiensi ini berhubungan dengan konsep produktivitas, pengukuran efisiensi yang dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan.
- c.

Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Laporan Realisasi Anggaran Sektor Publik	Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, atau pun menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri atas unsur pendapatan dan belanja		
Efektivitas Anggaran	Dukungan antara pengeluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini adalah pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau paket kebijakan. Kegiatan operasional ini dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut	$\text{Efek} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Anggaran penerimaan PAD}} \times 100\%$	Rasio

	mencapai tujuan dan sasaran aktif kebijakan (Mahmudi, 2011)		
Efisiensi Anggaran	Kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. Secara sistematis, efisiensi adalah perbandingan antara <i>output</i> dan <i>input</i> atau pun dengan istilah lain <i>output</i> per unit <i>input</i> (Raharjo, 2011).	$\text{Efis} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$	Rasio

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang diperlukan penelitian ini menggunakan metode atau teknik untuk mengumpulkan data yaitu sebagai berikut :

- a. metode dokumentasi. Prosedur pengumpulan data dokumentasi, tahapannya adalah penulis mempelajari data APBD kota Binjai periode 2016 - 2019 dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Studi Pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan mencari informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang akan diteliti, yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, disertai, jurnal, peraturan-peraturan dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis statistik deskriptif merupakan suatu kegiatan untuk menyusun, mengklasifikasikan,

menafsirkan serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang dihadapi atau diteliti.

Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa “statistik deskriptif yaitu statistik digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

Untuk mempermudah proses analisis yang akan dilakukan, penulis akan membuat model analisis yang akan dilakukan penulis dalam rangka menjawab permasalahan yang ada.

a. Analisis Efektivitas

Mardiasmo (2017) menyatakan bahwa “Efektifitas merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya”. Efektifitas adalah suatu hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spendingwisely*). Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program.

Dalam efektivitas ini tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan publik dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi *riil*. Yulianti (2015) mengemukakan “Kinerja sektor publik bisa dikatakan efektif yaitu rasio antara 90,01% s/d

100%, semakin tinggi rasio efektivitas maka kinerja akan semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitas berarti semakin buruk”. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran penerimaan dengan target anggaran penerimaan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Anggaran penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Apabila hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pendapatan dikatakan sangat efektif.
- b) Apabila hasil perbandingan mencapai 100%, maka pendapatan dikatakan efektif.
- c) Apabila hasil perbandingan mencapai 90-99%, maka pendapatan dikatakan cukup efektif.
- d) Apabila hasil perbandingan mencapai 75-89%, maka pendapatan dikatakan kurang efektif.
- e) Apabila hasil perbandingan mencapai dibawah 75%, maka pendapatan dikatakan tidak efektif.

b. Analisis Efisiensi

Efisiensi merupakan hubungan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*), efisiensi ialah suatu ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah untuk

mencapai tujuan organisasi perangkat publik dapat dicapai manfaat tertentu. *Input* merupakan segala sesuatu dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk mendapatkan keluaran. *Output* ialah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik dan non fisik. Oleh karena itu efisiensi merupakan tingkat pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Rasio efisiensi belanja dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria analisis rasio efisiensi dikategorikan sebagai berikut :

- a) Apabila hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
- b) Apabila hasil perbandingan mencapai 90-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
- c) Apabila hasil perbandingan mencapai 80-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
- d) Apabila hasil perbandingan mencapai 60-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
- e) Apabila hasil perbandingan mencapai dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai

Binjai adalah salah satu Kota (dahulu daerah tingkat II berstatus Kotamadya) dalam wilayah provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Binjai terletak 22 km di sebelah barat ibukota Provinsi Sumatera Utara, Medan. Adapun sejarah berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai pada Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2011 mengatakan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai adalah unsur pelaksanaan Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Mengingat bahwa Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai ini baru berpindah lokasi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan diresmikan langsung oleh walikota Binjai. Kantor baru berlokasi di jalan Jambi kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan. Sebelumnya Dispenda Kota Binjai berkantor di jalan Teuku Amir Hamzah kecamatan Binjai Utara yang merupakan gedung milik Pemprov.

Kota Binjai merupakan salah satu daerah tingkat II di provinsi Sumatera Utara dan telah memperbaiki dirinya dengan cara melakukan pemekaran wilayah. Sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 wilayah Kota Binjai diperluas menjadi 90,23 km dengan 5 wilayah Kecamatan yang terdiri dari 11 desa dan 11 kelurahan. Setelah dipecahkan desa dan kelurahan pada tahun 1993 jumlah desa menjadi 17 dan kelurahan menjadi 20.

Dalam perubahan berdasarkan keputusan gubernur Sumatera Utara Nomor 140-1395/SK/1993 tanggal 3 Juni 1993 yaitu tentang pembentukan 6 desa persiapan dan kelurahan persiapan di Kota Binjai. Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 146-2624/SK/1996 tanggal 7 Agustus 1996, 17 desa menjadi kelurahan.

4.1.2. Visi dan Misi Pemerintah Kota Binjai

Visi Kota Binjai

Visi ialah suatu pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi dengan kata lain merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan di masa depan yang berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan/tercapai oleh Instansi Pemerintah yang mengacu pada batasan tersebut, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Kota Binjai Tahun 2011-2015. Visi dalam Pembangunan Daerah Kota Binjai diuraikan sebagai berikut : **”Terwujudnya Binjai Sebagai Kota Idaman yang Dinamis, Berdaya Saing, dan Nyaman dalam Kebersamaan”**.

Berikut ini penjelasan makna dari kalimat visi adalah sebagai berikut :

- a) Idaman berarti Kota Binjai memiliki trademark/image sesuai dengan perkembangan kota dengan pembangunan yang berkelanjutan.
- b) Dinamis berarti Kota Binjai mampu mengikuti dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
- c) Berdaya Saing berarti Kota Binjai memiliki daya saing (Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, Industri, Jasa).

- d) Nyaman berarti Kota Binjai sebagai kota yang nyaman bagi semua stakeholder untuk mengikuti aktivitas kehidupan (bertempat tinggal, bekerja, dan beribadah).
- e) Kebersamaan berarti menghidupkan suasana bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan yang semangat “Binjai Kotaku, Kotamu, dan Kota Kita Semua”.

Misi Kota Binjai

Misi merupakan sesuatu pelaksanaan oleh Instansi Pemerintah yang sesuai dengan visi yang ditetapkan. agar tujuan organisasi dapat terwujud dan berhasil dengan baik, diharapkan seluruh aparatur dan pihak – pihak yang berkepentingan dan berwajib dapat mengenal Instansi Pemerintah Kotanya dan mengetahui fungsi pokok serta program – programnya dan hasil yang akan diperoleh di waktu yang akan datang. Oleh karena itu Pemerintah Kota Binjai mempunyai misi yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dalam rangka memcapai tujuan pembangunan kota, yang dasarnya adalah tonggak dari rencana strategis yang disusun untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang secara eksplisit menggambarkan kondisi Kota Binjai yang harus dicapai.

Adapun beberapa Misi Kota Binjai sebagai berikut :

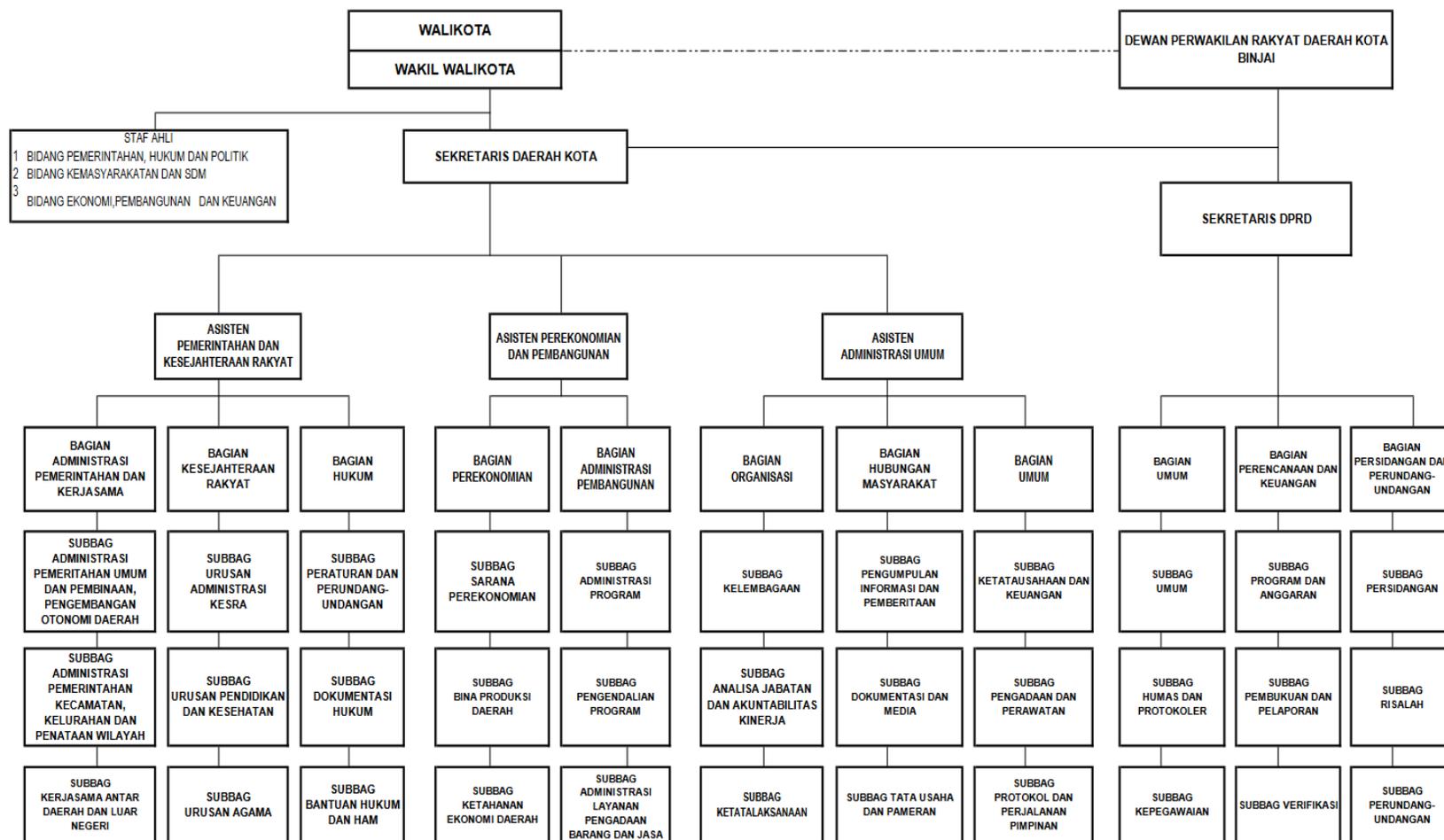
- a) Untuk membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang perekonomian.
- b) Untuk membangun masyarakat sehat, cerdas, dan berbudaya. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.
- c) Untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

- d) Untuk membangun dan membina kerukunan hidup beragama.
- e) Untuk meningkatkan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.

4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Binjai

Struktur Organisasi adalah susunan atau perwujudan yang mencerminkan arus atau garis perintah, tugas, kewajiban serta tanggung jawab. Pada umumnya suatu organisasi digambarkan dalam bentuk bagan sehingga dengan bagan tersebut akan dapat dilihat dengan jelas tantangan tugas serta kedudukan masing-masing orang dalam organisasi tersebut.

Organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing serta memperlancar aktifitas arus kerja perusahaan, oleh karena itu diperlukan struktur organisasi yang jelas dalam menggambarkan departemen-departemen tersebut. Adapun struktur organisasi Pemerintah Kota Binjai, dapat dilihat pada gambar IV-1 berikut ini :



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Binjai
 Sumber : Pemerintah Kota Binjai, 2021

4.1.4. Deskripsi Uraian Pekerjaan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 menyatakan Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 25) yaitu telah diubah beberapa kali terakhir ini dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2018 yaitu tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 35) telah diubah yaitu sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah adalah unsur staf pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, bertanggung jawab kepada Walikota. Tugas pokok Sekretariat Daerah ialah untuk membantu kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana, pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dari Sekretariat Daerah ini mencakup :

- a) Untuk melakukan pengkoordinasian perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah,
- b) Untuk menyelenggarakan administrasi pemerintah,
- c) Untuk melaksanakan pembinaan pembangunan,
- d) untuk melaksanakan pembinaan kemasyarakatan,

- e) Untuk melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi, dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada instansi vertical,
- f) Untuk melaksanakan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum yang menyangkut tugas pokok pemerintahan di daerah dan penyusunan anggaran,
- g) Untuk melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga,
- h) Untuk mengelola sumber daya aparatur keuangan prasarana dan sarana pemerintahan daerah kota,
- i) Untuk melaksanakan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya,

2. Staf Ahli Walikota Binjai, terdiri dari :

- a). Bidang Hukum dan Politik;
- b). Bidang Pemerintahan;
- c). Bidang Pembangunan;
- d). Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- e). Bidang Ekonomi dan Keuangan

3. Dinas–Dinas Daerah Kota Binjai, terdiri dari :

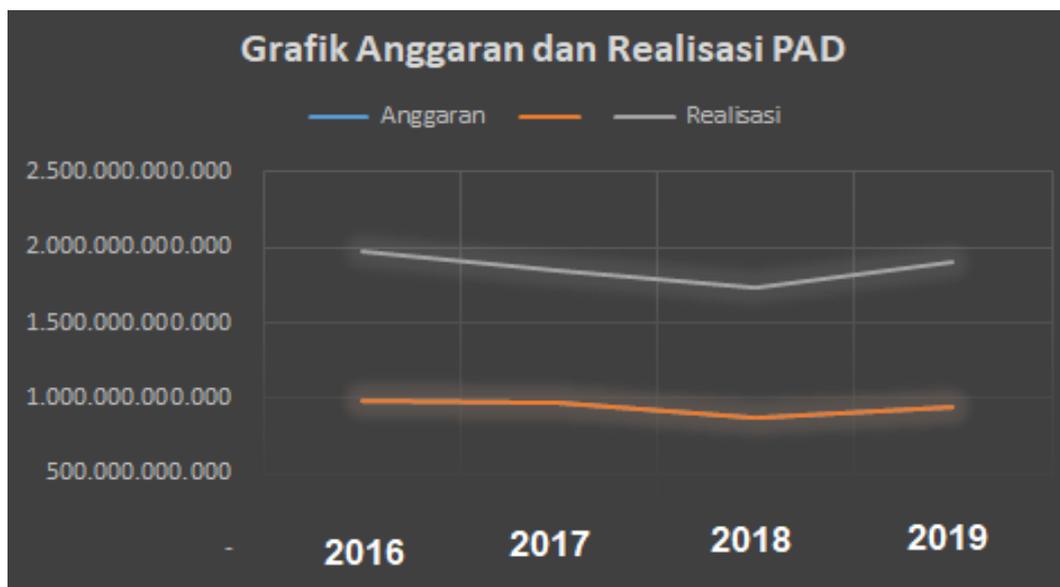
- a). Dinas Pendidikan dan Pengajaran;
- b). Dinas pemuda dan Olah Raga;
- c). Dinas Kesehatan;
- d). Dinas Sosial;
- e). Dinas Tenaga Kerja;
- f). Dinas perhubungan;

- g). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - h). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - i). Dinas Pekerjaan Umum;
 - j). Dinas Tata ruang perumahan dan pemukiman;
 - k). Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah;
 - l). Dinas Perindustrian, perdagangan dan pasar;
 - m). Dinas Pertanian;
 - n). Dinas Kebersihan dan pertamanan;
 - o). Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
4. Lembaga Teknis Kota Binjai, terdiri dari :
- a). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b). Badan Kesatuan Bangsa, politik, dan linmas;
 - c). Badan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
 - d). Badan Keluarga Berencana (KB) dan Pembangunan keluarga Sejahtera;
 - e). Badan Pendidikan dan pelatihan;
 - f). Badan Pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan;
 - g). Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - h). Kantor Pemberdayaan Perempuan;
 - i). Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
 - j). Kantor Penelitian dan pengembangan;
 - k). Badan Kepegawaian Daerah;
 - l). Inspektorat Kota;
 - m). Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham;

- n). Kantor pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - o). Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
5. Kecamatan Pemerintah Kota Binjai, terdiri dari :
- a). Kecamatan Binjai Kota;
 - b). Kecamatan Binjai Utara;
 - c). Kecamatan Binjai Timur;
 - d). Kecamatan Binjai Selatan;
 - e). Kecamatan Binjai Barat;
6. Kelurahan Pemerintah Kota Binjai, terdiri dari 37 Kelurahan.
7. Badan Narkotika Kota Binjai.

4.1.5. Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Dalam pembahasan hasil penelitian ini yaitu membahas mengenai bagaimana tingkat efektifitas pelaksanaan anggaran pendapatan untuk menilai kinerja Pemerintah Kota Binjai dengan menggunakan yang rasio efektifitas terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan pada tahun 2016-2019.

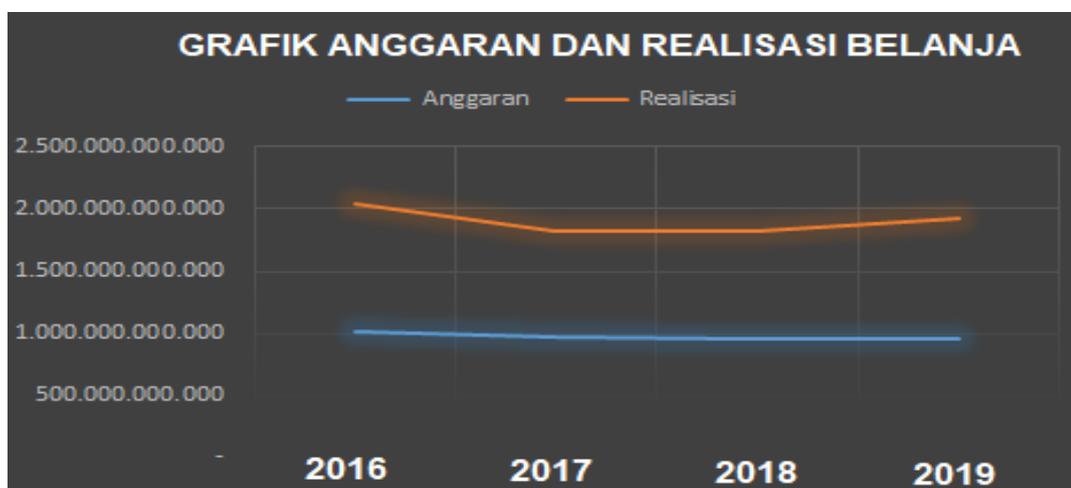


Gambar 4.2. Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Grafik di atas memperlihatkan perkembangan data anggaran dan realisasi pendapatan Pemerintah Kota Binjai selama tahun 2016 – 2019. Grafik di atas menunjukkan bahwa adanya pergerakan fluktuasi penerimaan pendapatan daerah, dimana terjadi sedikit penurunan di tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2016 pendapatan yang dihasilkan adalah sebesar Rp. 983.874.628.421 turun di tahun 2017 menjadi Rp 879.551.758.424,48. Pada tahun 2018 pendapatan masih turun menjadi Rp 867.761.218.147, namun pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 960.365.036.459. Pendapatan-LRA ialah suatu penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang berkaitan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

4.1.6. Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja

Dalam pembahasan hasil penelitian ini ialah membahas tentang bagaimana tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja untuk menilai kinerja Pemerintah Kota Binjai dengan menggunakan rasio efisiensi terhadap pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Kota Binjai Kota Palembang pada tahun 2016-2019.



Gambar 4.3. Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja

Grafik di atas memperlihatkan perkembangan data anggaran dan realisasi belanja Pemerintah Kota Binjai selama tahun 2016 – 2019. Grafik di atas menunjukkan bahwa adanya pergerakan fluktuasi belanja daerah, dimana terjadi sedikit penurunan di tahun 2017. Pada tahun 2016 belanja yang dihasilkan adalah sebesar Rp. 1.025.411.103.368,5 turun di tahun 2017 menjadi Rp 849.025.483.683,96. Pada tahun 2018 belanja naik menjadi Rp 867.761.218.147, dan pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi Rp 957.665.036.459.

Belanja yang diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran ini melalui bendahara pengeluaran

pengakuan yang terjadi saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Dalam hal klasifikasi ekonomi merupakan suatu pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat ialah belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi belanja pemerintah daerah yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga. Belanja operasi dikelompokkan ialah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja modal dikelompokkan dalam pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal yaitu dikelompokkan meliputi sebagai berikut belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja lain-lain/tak terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

4.1.7. Analisis Efektivitas Anggaran

Dalam efektivitas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dihitung dengan menggunakan rasio efektivitas. Rasio ini menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk merealisasikan APBD yang direncanakan dan dibandingkan dengan APBD yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Setelah melakukan analisis efektivitas, adapun cara untuk mengetahui kriteria efektivitasnya yaitu sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} : \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Efektivitas

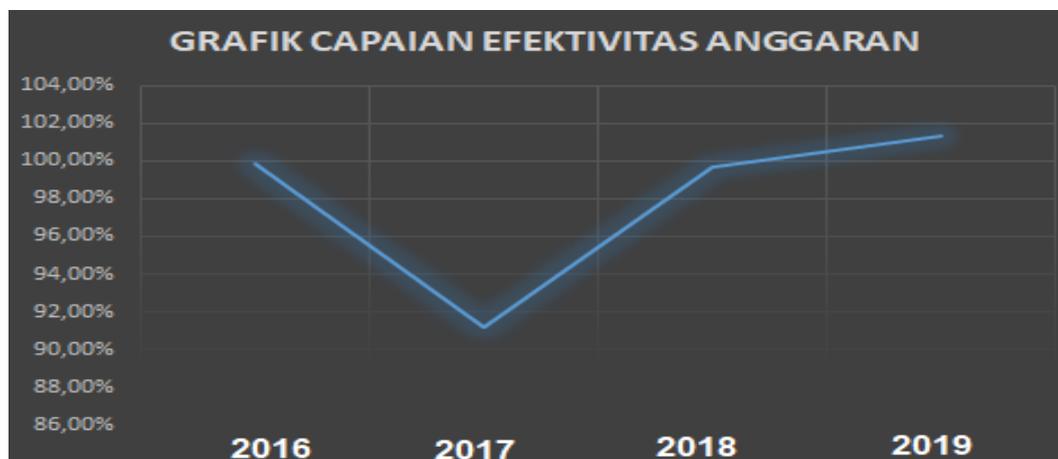
Sangat efektif	>100%
Efektif	= 100%
Cukup efektif	90%-99%
Kurang efektif	75%-89%
Tidak efektif	<75%

Sumber: Mahmudi (2016:141)

Tabel 4.1. Perhitungan Efektivitas Anggaran

Keterangan	2016	2017	2018	2019	
1	Pendapatan				
	Anggaran	985.607.494.365	964.903.163.076	870.461.218.147	948.180.431.992
	Realisasi	983.874.628.421	879.551.758.424	867.761.218.147	960.365.036.459
Capaian Efektivitas	99,82%	91,15%	99,69%	101,29%	
Kesimpulan	Cukup Efektif	Cukup Efektif	Cukup Efektif	Sangat Efektif	

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021



Gambar 4.4. Grafik Capaian Efektivitas

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, terlihat bahwa Pemerintah Kota Binjai pada tahun 2016-2018 memiliki tingkat efektivitas di <100%. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam mengelola anggaran daerah Pemerintah Kota Binjai masuk dalam kategori cukup efektif, yaitu masih belum tepat pada apa yang telah menjadi target anggaran. Dilihat dari tahun 2016 tingkat efektivitas sebesar 99,82% dengan kriteria cukup efektif, tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 8,67% sehingga tingkat efektivitas menjadi 91,15% dengan kriteria cukup efektif, tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 8,54% sehingga tingkat efektivitas menjadi 99,69% dengan kriteria masih cukup efektif. Tahun tahun 2019 kembali mengalami peningkatan sebesar 1,6% sehingga tingkat efektivitas menjadi 101,29% dengan kriteria sangat efektif. Pemerintah Kota Binjai berhasil meningkatkan realisasi PAD pada tahun 2019, yang mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Binjai sudah dikatakan mampu mengelola daerahnya untuk meningkatkan sumber PAD nya, yang secara tidak langsung kegiatan perekonomian daerah tersebut juga akan meningkat.

4.1.8. Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi merupakan suatu hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi ini dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Dalam proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya (Mardiasmo, 2009). Sedangkan Mahmudi (2007) menyatakan bahwa efisiensi yaitu suatu analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja. Setelah melakukan analisis dengan menggunakan rumus, adapun cara untuk mengukur kriteria efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria Efisiensi

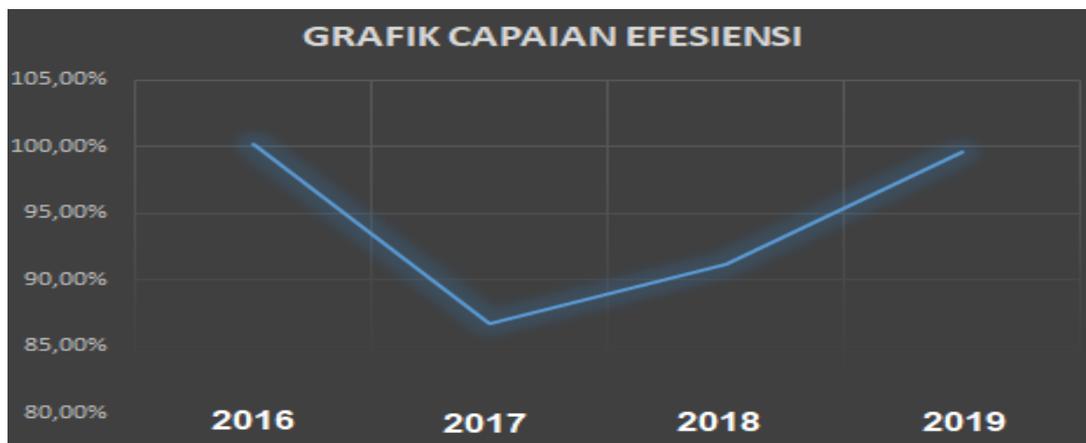
Tidak efisien	>100%
Kurang efisien	90%-100%
Cukup efisien	80%-89,99%
Efisien	60%-79,99%
Sangat efisien	<60%

Sumber: Mahsun (2013) dalam Rukayah et al.,(2017:6)

Tabel 4.2. Perhitungan Efisiensi Anggaran

Jenis Anggaran		2016	2017	2018	2019
2	Belanja				
	Anggaran	1.023.554.570.569	978.587.608.010	951.373.613.233	961.857.047.999
	Realisasi	1.025.411.103.369	849.025.483.684	867.761.218.147	957.665.036.459
Capaian Efisiensi		100,18%	86,76%	91,21%	99,56%
Kesimpulan		Tidak Efisien	Cukup Efisien	Kurang Efisien	Kurang Efisien

Sumber : Data Olahan, 2021



Gambar 4.4. Grafik Capaian Efisiensi Anggaran

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa Pemerintah Kota Binjai pada tahun 2016 memiliki tingkat efisiensi sebesar 100,18%. Menurut kriteria efisiensi yang telah ditetapkan, semakin besar nilai efisiensi yang mendekati angka 100%, maka menunjukkan tingkat efisiensi yang kurang efisien. Hasil ini ditunjukkan oleh Realisasi Belanja sebesar Rp 1.025.411.103.369 dan Anggaran Belanja sebesar Rp 1.023.554.570.569. Selisih Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja sebesar Rp 1.856.532.800, yang berarti pada tahun 2016 pemerintah daerah tidak efisien melakukan penghematan anggarannya.

Tahun 2017 Pemerintah Kota Binjai memiliki tingkat efisiensi sebesar 86,76%. Menurut kriteria efisiensi yang telah ditetapkan, semakin besar nilai efisiensi yang mendekati angka 100%, maka menunjukkan tingkat efisiensi yang kurang efisien. Hasil ini ditunjukkan oleh Realisasi Belanja sebesar Rp 849.025.483.684 dan Anggaran Belanja sebesar Rp 978.587.608.010. Selisih Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja sebesar Rp - 129.562.124.326, yang

berarti pada tahun 2017 pemerintah daerah cukup efisien melakukan penghematan anggarannya.

Tahun 2018 Pemerintah Kota Binjai memiliki tingkat efisiensi sebesar 91,21%. Menurut kriteria efisiensi yang telah ditetapkan, semakin besar nilai efisiensi yang mendekati angka 100%, maka menunjukkan tingkat efisiensi yang kurang efisien. Hasil ini ditunjukkan oleh Realisasi Belanja sebesar Rp 867.761.218.147 dan Anggaran Belanja sebesar Rp 951.373.613.233. Selisih Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja sebesar Rp - 83.612.395.086, yang berarti pada tahun 2018 pemerintah daerah kurang efisien melakukan penghematan anggarannya.

Tahun 2019 Pemerintah Kota Binjai memiliki tingkat efisiensi sebesar 99,56%. Menurut kriteria efisiensi yang telah ditetapkan, semakin besar nilai efisiensi yang mendekati angka 100%, maka menunjukkan tingkat efisiensi yang kurang efisien. Hasil ini ditunjukkan oleh Realisasi Belanja sebesar Rp 957.665.036.459 dan Anggaran Belanja sebesar Rp 961.857.047.999. Selisih Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja sebesar Rp - 4.192.011.540, yang berarti pada tahun 2019 pemerintah daerah kurang efisien melakukan penghematan anggarannya.

4.2.Pembahasan

4.2.1. Efektifitas Anggaran Pendapatan

Efektifitas adalah kemampuan pemerintah untuk merealisasikan anggaran belanja yang telah direncanakan dengan target yang ditentukan. Kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dapat dikategorikan efektif dengan beberapa

nilai hasil perhitungan rasio. Jika rasio efektif $>60\%$ maka dinilai tidak efektif. jika rasio efektif antara $60\%-80\%$ maka dinilai kurang efektif, jika rasio efektif antara $80\%-90\%$ maka dinilai cukup efektif, jika rasio efektif antara $90\%-100\%$ maka dinilai efektif, jika rasio efektif $> 100\%$ maka dinilai sangat efektif. Semakin besar rasio efektifitas berarti kinerja pemerintah semakin baik.

Hasil perhitungan mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan pada Pemerintah Kota Binjai untuk tahun 2016-2019 belum menunjukkan kriteria sangat efektif. Secara keseluruhan, untuk tiap tahunnya realisasi pendapatan masih lebih kecil dari realisasi anggaran pendapatan, namun capaiannya masuk kedalam kategori cukup efektif dimana target rasio capaiannya rata – rata di atas $90\%- 100\%$ setiap tahunnya.

Realisasi anggaran belanja dapat dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Mengenai diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA. Akuntansi belanja dapat disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, atau dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kiky Muryanti (2017) yang menyatakan yaitu perkembangan terhadap tingkat efektivitas pengelolaan keuangannya sangat efektif dan terhadap tingkat efisiensi pengelolaan keuangan

efisien. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan PP No.71 tahun 2010 yaitu dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan dikelola oleh pemerintahan pusat/daerah, atau menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporannya. Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Binjai dalam pelaksanaan anggaran belanja tolak ukur yang digunakan adalah membandingkan realisasi anggaran belanja dengan anggaran belanja dikalikan 100%. Unsur-unsur belanja di Pemerintah Kota Binjai yaitu terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Untuk belanja tidak langsung semua belanja sudah terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan secara keseluruhan sudah teralisasi secara optimal, sedangkan belanja langsung semua program kegiatan sudah ditargetkan dengan keseluruhan teralisasi sesuai pada yang ditargetkan kinerja pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Kota Binjai tahun 2019 sudah berhasil.

4.2.2. Efisiensi Anggaran Belanja

Efisiensi anggaran belanja merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan anggaran suatu organisasi, untuk dapat memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal. Hasil perhitungan dalam tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja di Pemerintahan Kota Binjai untuk tahun 2016-

2019 belum menunjukkan kriteria sangat efisien. Secara keseluruhan, untuk tiap tahunnya realisasi belanja langsung memang lebih kecil dari realisasi anggaran belanja, namun target rasio capaiannya rata – rata masih di atas 90% setiap tahunnya. Unsur-unsur belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Semua unsur belanja realisasinya tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Dengan hasil perhitungan dari tahun ketahun kinerja Pemerintah Kota Binjai dalam pelaksanaan anggaran belanja dapat menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja..

Dalam hal ini hasil penelitian yaitu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariel (2013) menyatakan yaitu tingkat efektifitas atau efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Kota Binjai sudah dikategorikan efektif dan efisien dan kinerja pelaksanaan anggaran belanja dapat dikatakan berhasil. Hasil penelitian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan SAP mengemukakan bahwa belanja yang diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah. Dalam pengertian lain yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 telah diubah dengan Permendagri no.59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan peraturan Menteri dalam Negeri N0.21 tahun 2011 tentang perubahan kedua. Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Binjai dalam pelaksanaan anggaran belanja langsung, tolak ukur yang digunakan untuk membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan anggaran belanja dikalikan 100%.

Terkait dalam belanja Pemerintah Kota Binjai dapat dikatan cukup efisien jika realisasi belanja tidak melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan.

Jumlah belanja yang dianggarkan yaitu batas tertinggi dalam setiap jenis belanja. Unsur-unsur belanja tersebut terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung yaitu meliputi belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Unsur belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan jasa serta belanja modal. Semua unsur belanja daerah realisasinya tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini tingkat efisiensi anggaran belanja Pemerintah Kota Binjai setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 tingkat efisiensi sebesar 100,18% menjadi 86,76% pada tahun 2017. Dari sudut pandang efisiensi perubahan ini dapat dipandang sebagai peningkatan tingkat efisiensi. tetapi masih dalam kriteria yang hanya cukup efisien. Pada tahun 2018 mengalami penurunan tingkat efisiensi menjadi sebesar 91,21% dan memiliki kriteria cukup efisien. Pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan tingkat efisiensi menjadi 99,56%. Secara keseluruhan, anggaran belanja Pemerintah Kota Binjai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sudah cukup efisien dengan tingkat efisiensi dibawah 100% dan masuk pada kategori cukup efisien. Unsur-unsur belanja tersebut terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Semua unsur belanja realisasinya tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas realisasi anggaran kinerja pemerintah daerah Pemerintahan Kota Binjai tahun anggaran 2016 - 2019 dapat dikatakan cukup efektif, yaitu dengan memiliki tingkat presentase efektivitas rata-rata kurang dari 100%. Hal ini berarti pemerintah daerah belum cukup berhasil merealisasikan pendapatan dan anggaran pendapatannya. Meskipun tingkat presentase efektivitasnya dari tahun ke tahun meningkat, tetapi tetap belum dapat mempertahankan kriteria tingkat efektivitasnya berada pada kriteria cukup efektif.
2. Tingkat efisiensi realisasi anggaran kinerja pemerintah daerah Kota Binjai pada tahun 2016 memiliki kriteria kurang efisien, kemudian 2017 memiliki kriteria cukup efisien dan di 2018-2019 memiliki kriteria kurang efisien, dengan memiliki tingkat presentase efisiensi rata-rata 80%-89,99%. Hal ini berarti pemerintah daerah Pemerintah Kota Binjai telah cukup berhasil menunjukkan kinerja yang masih cukup baik. Pemerintah Kota Binjai dinilai belum bisa menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran untuk ber manfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kota Binjai sebaiknya tetap meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan daerahnya dengan memaksimalkan hasil pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
2. Pemerintah daerah Kota Binjai sebaiknya lebih mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk memperbaiki pengelolaan dalam penggunaan anggaran belanja agar lebih ditingkatkan efisiensinya. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan menilai kembali belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan skala prioritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariel S. Sumenge. (2013). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA, VOL. 1 NO 3 September 2013. Hal. 74-81. Universitas Sam Ratulangi, Manado.*
- Baihaqi. (2011). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi.*
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Erlangga: Jakarta.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi manajemen sektor Publik*. Jakarta :Salemba Empat.
- Barus, M. D. B., & Hakim, A. (2020). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika melalui Metode Practice Rehearsal Pairs pada Siswa SMA Al-Hidayah Medan. *Biormatika: Jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, 6(1), 74-78.*
- Dien, Tinango dan Walandouw. (2015). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA. Vol. 3 No.1 Maret 2015. Universitas sam Ratulangi. Manado*
- Haruman dan Sri Rahayu. (2010). “ *Penyusunan Anggaran*”. Edisi Pertama, SalembaEmpat : Jakarta.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Salemba Empat : Jakarta.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Salemba Empat : Jakarta.
- Irawan, S., & Si, M. (2019). Analisis manajemen persediaan, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di bei. *Jurnal Manajemen, 11(1).*
- Julita dan Jufrizen, (2012).*Budgeting*. Penerbit Ciptapustaka Media Perintis Bandung.
- Kiky Muryanti. (2017). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Wonogiri Tahun Anggaran 2011- 2015. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah, Surakarta.*
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*, Cetakan Pertama. UII PREES. Yogyakarta.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII PREES
- Mahsun, Moh, Firman Sulistyowati dan Heribertus Andre Purwanugraha. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*, BPFE: Yogyakarta.

- Mardiasmo. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Husein, Umar. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Nafirin. (2012). “ *Penganggaran Rencana Kerja Perusahaan* “. Edisi Kesatu. Salemba Empat: Jakarta.
- Mudrajad, Kuncoro. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi Empat* Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nasution, N. A., & Oktari, A. (2021). Pengaruh cash flow, account receivable turnover, modal kerja dan pertumbuhan penjualan terhadap likuiditas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(2), 91-115.
- Rahardjo, Adisasmita. (2011). *Pengelolaan Kerja dan Anggaran Daerah*. Cetakan Pertama, Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Roland Gerald Tooy, David Paul, Elia Saerang, Lidia Mawikere. (2016). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan (BAPPELITBANG) Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 16 No. 04 tahun 2016. Hal 659-671*. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sari, P. B. (2020). Analisis Opini Going Concern Pada Perusahaan Farmasi di Bursa Efek Indonesia (Multiple Correlation Method). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 189-196.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Yulianti, Umi. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdesa). Seminar Nasional ISBN 978-602-73690-3-0. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Zendrato, Yustin Kurniawan. (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. *Jurnal EKOBIS Vol. II No. 1 Desember 2018*. Univeritas Sjakhyakrti, Palembang.